

STRATEGI DAKWAH PEREMPUAN BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI

¹ Siti Inayatul Faizah

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya

e-mail: siti-i-f@feb.unair.ac.id

Abstrak- Dakwah tidak hanya berbicara tentang fiqih ibadah, baca tulis Al-Qur'an, namun juga menyangkut kehidupan ekonomi, karena ini menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan rumah tangga Islam. Pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Sumber daya ekonomi yang dimiliki perempuan, seperti pekerjaan dan penghasilan yang stabil, akan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi perlu menjadi salah satu fokus dalam dakwah. Dengan demikian perlu adanya strategi dakwah perempuan berbasis pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan terhadap upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam penguatan ekonomi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan, perluasan akses kredit, membangun jaringan komunitas dan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Kata kunci: *Strategi, Dakwah, Perempuan, Ekonomi.*

Abstract- "Dakwah" not only speaks of religion, reading the Quran, but also concerns economic life, because this is one of the important factors in the life of Islamic households. Economic empowerment of women has a positive impact on improved family well-being. The economic resources women have, such as stable jobs and income, will be able to make a greater contribution to the family's economic needs. Therefore, economic empowerment should be one of the focuses of worship. So we need a women's empowerment-based strategy. This study is a library study of the efforts and strategies that can be taken to increase women's participation in economic empowerment. The results of this study show that economic empowerment of women can be achieved by providing education and training, broadening access to credit, building community networks and policies that favour women.

Keywords: *Strategy, Da'wah, Women, Economics.*

Pendahuluan

Strategi secara bahasa memiliki makna yang identik dengan aktifitas militer dan cara memenangkan pertempuran dengan segala potensi yang dimiliki. Fatah seperti dikutip Ahmad, menyebutkan bahwa strategi adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan (Ahmad, 2020). Dengan demikian semua aktifitas manusia sebenarnya membutuhkan strategi yang tepat agar dapat mencapai

tujuan yang diinginkannya. Demikian pula dalam aktifitas dakwah yang bertujuan mengajak orang untuk menuju ke jalan kebaikan dengan seruan baik secara lisan, tulisan, maupun dengan tindakan atau perbuatan.

Tentu saja dakwah membutuhkan strategi yang benar dan tepat pada kondisi tertentu. Seruan yang dilakukan harus mampu menyentuh orang, jamaah, atau umat yang akan diseru sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, cara menyeru orang kepada kebaikan harus dilakukan dengan baik pula. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An Nahl: 125 yang terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (An-Nahl ayat: 125).

Tafsir Kementerian Agama menyebutkan bahwa dalam ayat ini, Allah swt memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah. Allah swt meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. *Pertama*, Allah swt menjelaskan kepada Rasul-Nya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridha-Nya, bukan dakwah untuk pribadi *da'i* (yang berdakwah) ataupun untuk golongan dan kaumnya. Rasul saw diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata. *Kedua*, Allah swt menjelaskan kepada Rasul saw agar berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu mengandung beberapa arti pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu. Dengan pengetahuan itu sesuatu dapat diyakini keberadaannya. Hikmah juga berarti perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil (argumen) untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau syubhat (meragukan) serta mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, paham agama, takut kepada Allah, serta benar perkataan dan perbuatan. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu Ilahi, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, agar mudah dipahami umat. *Ketiga*, Allah swt menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik.

Kata ud'u dalam ayat di atas yang dimaknai sebagai “seruan” merupakan perintah yang melekat adanya kewajiban pada setiap muslim meskipun dalam tafsir lainnya ada yang menyatakan sebagai wajib ainiyah dan ada juga yang menyebutkan wajib kifayah (A.Sanwar, 1986). Secara umum memahami ayat tersebut sebagai kewajiban mutlak bagi umat Islam dalam menyeru kepada kebaikan dengan strategi dakwanya masing-masing.

Strategi dakwah telah banyak dilakukan oleh para pendakwah dengan menasar pada berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar pendakwah memberikan seruan dakwah dengan tema dan topik umum yang berkaitan dengan perintah ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan tema fiqh lainnya. Sedangkan masih sangat minim strategi

dakwah yang menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi umat, padahal ini menjadi salah satu factor penting dalam kehidupan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas beragama dan beribadah. Oleh karena itu, dakwah yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi umat sangat penting dilakukan.

Perempuan sebagai kekuatan dalam rumah tangga perlu dibekali dengan pengetahuan dan penguatan pada aspek ekonomi. Pemberdayaan ekonomi perempuan harus dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik sehingga dapat mendukung ekonomi keluarga. Hal ini yang jarang mendapatkan perhatian pendakwah, meskipun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari namun masalah ekonomi tidak bisa dianggap sepele. Oleh sebab itu, kajian ini penting untuk mengedepankan urgensi dakwah berbasis ekonomi khususnya pada kaum perempuan, sehingga kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi.

Metode Penelitian

Kajian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian kepustakaan terhadap teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan dengan tema strategi dakwah dan pengembangan ekonomi perempuan. Data dikumpulkan terlebih dahulu dengan tema di atas, kemudian peneliti mengkodifikasikan artikel yang berkaitan dengan dakwah berbasis ekonomi. Setiap hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan dianalisis, dikaji dan dijadikan acuan untuk menguraikan strategi dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan. Tahapan terakhir, kajian ini memberikan gagasan sebagai kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007), Pemberdayaan adalah perbuatan yang membuat berdaya yakni kemampuan untuk melakukan Tindakan berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan Masyarakat baik material dan spiritual untuk mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa (Margayaningsih, 2018).

Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kokoh, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar (Sumodiningrat, 1998). Masalah ekonomi rakyat adalah masalah struktural, maka pemberdayaan ekonomi juga harus dilakukan dengan perubahan struktural. Menurut

Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat kekal, namun sampai target masyarakat mampu untuk berdaya meski dari ditinjau agar tidak kembali ke asalnya. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkipra dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup.

Menilik adanya kesetaraan gender yang digaunngkan R.A. Kartini bahwa zaman dahulu adanya pandangan stereotip bahwa perempuan masih dipandang sebelah mata dan hanya sebagai warga kelas dua bahkan stigma Perempuan dengan pekerjaan domestik, yang bahkan secara kasar dalam jawa disimpulkan tugas perempuan hanya 3M yakni '*Masak, Macak dan Manak*' yang artinya dimana Perempuan hanya memiliki 3 tugas yakni memasak di dapur untuk keluarga, berdandan untuk suami dan melahirkan anak-anak dalam keluarga. Sejatinya, tugas wanita lebih kompleks daripada itu. Perempuan di era saat ini memiliki peranan vital, baik sebagai pribadi, istri, ibu serta wara negara yang berkewajiban mendidik putra bangsa serta menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak positif yang signifikan, bukan hanya bagi perempuan secara individual, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu alasan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan adalah peningkatan kesejahteraan keluarga. Ketika perempuan memiliki sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan dan penghasilan yang stabil, mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Ini mencakup pendidikan anak-anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal itu secara tidak langsung mendorong perempuan kemandirian finansial. Mereka dapat mengelola keuangan mereka sendiri, membuat keputusan keuangan yang lebih baik, dan memiliki kontrol lebih besar terhadap hidup mereka. Bahkan secara makro, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengembangkan bisnis, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan mendorong partisipasi perempuan berdaya dalam pasar tenaga kerja. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta menciptakan pembangunan ekonomi menyeluruh untuk negara kita. Dengan memberikan kesempatan ekonomi yang sama kepada perempuan, kita dapat mencapai kesetaraan gender. Isu kesetaraan hak antara laki-laki dan Perempuan diformalkan di Indonesia pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 15, yang berbunyi "Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Pemberdayaan ekonomi dapat mengubah norma sosial dan memberikan kontribusi pada perubahan pola pikir yang mendukung kesetaraan.

Alat efektif dalam pencegahan kemiskinan dan kelaparan adalah memberikan kesempatan bagi Perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Dengan memberikan perempuan akses terhadap sumber daya ekonomi, kita dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan keamanan pangan. Mengikutsertakan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi juga membawa inovasi dan kreativitas baru ke dalam berbagai sektor. Perbedaan pandangan dan pengalaman perempuan dapat membuka pintu untuk solusi baru dan perkembangan inovatif.

Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya tentang keadilan sosial ataupun kesetaraan gender, tetapi juga merupakan strategi integral untuk menggapai pembangunan berkesinambungan dan inklusif. Dengan memberikan perempuan keleluasaan yang setara dalam peluang pembangunan ekonomi, sehingga dapat memaksimalkan potensi manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan dinamis.

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

a. Akses terhadap Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga Masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan. Sesuai dalam pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”. Akses pendidikan yang bermutu merupakan hak asasi setiap warga negara, tanpa dibatasi oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender, berhak memperoleh service pendidikan yang baik.

Ketidasetaraan akses perempuan dalam pendidikan, salah satunya disebabkan adanya budaya patriarki yang sebagian besar ada di belahan dunia termasuk di Indonesia (Nasir & Lilianti, 2017), ternyata berkembangnya peradaban di Indonesia sulit terlepas dari belenggu ajaran patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, hak sosial, otoritas moral serta penguasaan properti (Teniwut, 2022). Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikn pandangan bahwa laki-laki adalah yang utama dan melakukan kendali terhadap wanita (Nursaptini dkk, 2019).

Di kehidupan bermasyarakat terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi, karena kodrati perempuan nantinya ada di dapur. Bahkan dalam keluarga yang mempunyai keuangan minim, maka pendidikan akan lebih diperuntukkan pada anak laki-laki (Narwoko, 2013). Biasanya orang tua lebih mementingkan anak laki-lakinya untuk sekolah yang tinggi sedangkan anak perempuannya hanya akan ditempatkan di rumah. Hal ini membuat anak perempuan kesulitan untuk mendapatkan akses pengetahuan.

Pembentukan budaya patriarki dimulai dalam lingkungan terkecil yakni lingkungan internal keluarga. Budaya patriarki di Masyarakat seakan dinormalisasi, sehingga adanya anggarap bahwa kaum perempuan secara kodrati lebih lemah (Adji,

2009). Selain itu, keluarga yang menggunakan sistem patriarki memberikan peluang anak laki-laki lebih unggul dalam mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan (Wardani, 2009). Dengan adanya pendidikan yang baik dan bermutu, anak-anak bangsa berkesempatan mendapatkan profesi yang baik atau mendapatkan kemudahan dalam hidupnya.

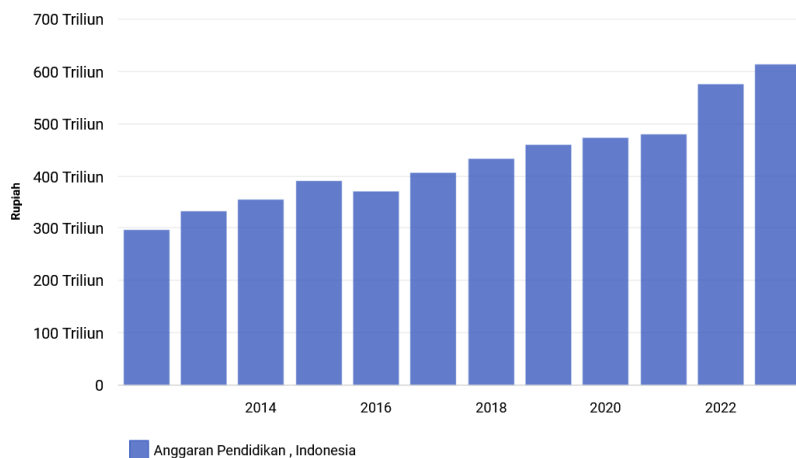
b. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Pemerintah masih berusaha mengurangi ketimpangan gender di Indonesia dengan beragam cara. Pemerintah bahkan mendorong semua sektor agar memastikan Perempuan mendapatkan akses terhadap faktor-faktor penunjang pemberdayaan ekonomi, termasuk pembiayaan dan peningkatan literasi digital.

Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi, jika tidak selamanya perempuan akan termarjinalkan dalam ranah tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan.

c. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender, dibutuhkan peran negara di dalamnya. Peran dan kepedulian negara terhadap kaum Perempuan dapat dilakukan dengan memberi ruang untuk terus berkarya. Peran kaum Perempuan di Indonesia mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, yang terbukti dari meningkatnya jumlah angka kerja perempuan di berbagai bidang pembangunan.



Gambar 1. Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan Indonesia
Sumber: Katadata, 2023

Dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan Perempuan dilakukan dengan menaikkan anggaran pendidikan yang dilakukan setiap tahunnya. Anggaran pendidikan

tahun 2023 yang dikucurkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp612,2 triliun.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga sangat menyoroti peran Perempuan dalam bidang ekonomi. Bahkan memperluas akses bagi perempuan dipermudah, dengan keyakinan bahwa pemberdayaan Perempuan adalah kunci dari kenaikan pendapatan suatu negara dan akan menentukan kemajuan negara.

Tidak hanya turut berkontribusi dan menyumbang pada peningkatan ekonomi bangsa, namun juga ketahanan ekonomi perempuan diyakini sebagai hulu dari penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan. Kementerian PPPA juga berkomitmen untuk terus berusaha membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kapasitas Perempuan Indonesia, agar bisa berdaya secara ekonomi. Pemerintah juga mendorong dan mendukung UMKM Perempuan agar dapat memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya bahkan mengakses produk-produk keuangan inklusif serta meningkatkan kemampuan literasi digital yang baik sehingga kaum Perempuan dapat berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Kementerian PPPA dan kelompok Perempuan serta jaringan kewirausahaan terlibat dalam melakukan analisis komprehensif tentang tantangan perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan.

Seharusnya dalam dunia dakwah ini menjadi perhatian agar pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus. Demikian pula dalam dunia politik dan pemerintahan, ada kebijakan afirmasi terkait alokasi 30 persen bagi legislator Perempuan, dengan dibentuknya kelembagaan terkait peran Perempuan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Komnas Perempuan dan legislasi untuk melindungi anak dan Perempuan. Begitupun dengan adanya presidensi G-20 Indonesia 2022 tak luput dari penguatan peran Perempuan dalam memulihkan krisis global pascapandemi covid-19. Kesetaraan gender, keterlibatan Perempuan dalam ekonomi local bahkan digitalisasi ekonomi menjadi isu utama selama G-20 (*Memberdayakan Perempuan, Membangkitkan Ekonomi*, 2022).

Tentu hal ini menjadi keuntungan bagi dakwah perempuan untuk dapat memiliki peran yang besar dalam mendidik umat, membangun bangsa dan negara.

3. Strategi Dakwah melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Program Pendidikan dan pelatihan keterampilan perempuan dalam dilakukan di Majelis Taklim, kegiatan pengajian-pengajian yang diisi dengan materi pemberdayaan ekonomi. Misalnya dengan memberikan jadwal yang bervariasi pada materi pengajian dan majelis taklim. Hal ini penting agar tingkat pengangguran di Indonesia pada 2019 ini berkurang, dengan adanya penambahan angkatan kerja sebanyak 2,24 juta orang. Menurut data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 meningkat sebesar 1,7% menjadi 136, 18 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2018. Sejalan dengan ini, tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)

naik 0,12% menjadi 69,32% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mengindikasikan adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang meningkat. Namun keadaan ini belum sejalan dengan kesetaraan gender yang gencar disosialisasikan dalam dunia kerja.

Partisipasi angkatan kerja Perempuan di Indonesia hanya 54 persen. Angka tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki sebanyak 83 persen. Pendidikan bagi Perempuan sangat vital untuk mengembangkan negara khususnya Indonesia. Perempuan berpendidikan tinggi mampu membagi kehidupan pribadi mereka dengan kehidupan profesional serta dapat membawa Indonesia untuk menggapai kesetaraan gender dan memimpin masa depan yang lebih cerah.

Islam mengajarkan agar kaum hawa memiliki peranan pendidikan dan sosial tanpa melepaskan jati diri dan kehormatannya. Perempuan adalah *madrasatul ula*, hal itu juga yang melatarbelakangi pentingnya pendidikan untuk perempuan yakni sebagai sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ajaran Islam tidak ada diskriminasi pendidikan antara laki-laki dan Perempuan, keduanya sama-sama diwajibkan menuntut ilmu sesuai dengan fitrahnya, mengembangkan potensinya dalam rangka melaksanakan tugas hidup sebagai hamba maupun sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Dalam Quran Surat An-Nisa (4) ayat 32 menjelaskan bahwa Perempuan juga memiliki hak untuk memiliki, berdagang dan mengembangkan hartanya. Yang artinya, kedudukan Perempuan sederajat dengan laki-laki dan ia memiliki hak atas apa yang ia usahakan.

Pendidikan keterampilan hidup dapat membantu wanita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Adanya pelatihan dan pembelajaran keterampilan hidup sangat penting, terutama bagi kaum hawa yang tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup untuk memperoleh pendidikan formal.

b. Akses terhadap Kredit dan Modal Usaha

Modal diperlukan untuk menutupi biaya operasional sehari-hari, membeli peralatan dan bahan mentah, serta mendanai upaya pemasaran dan periklanan. Tanpa modal yang cukup, usaha mikro tidak dapat berfungsi dengan lancar dan akhirnya bangkrut. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan yang terjamin. Program KUR bertujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan badan usaha sebagai bagian dari implementasi kebijakan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan memperkuat UMKM.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Fisik dan Penguatan UMKM. Program KUR resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Dana yang disalurkan KUR disediakan oleh dana bank atau lembaga keuangan yang menjadi mitra penyalur KUR.

c. Pengembangan Jaringan dan Dukungan Komunitas

Jaringan bisnis dapat dipahami sebagai suatu bentuk organisasi dalam bidang perekonomian yang berfungsi menyelenggarakan koordinasi dan menjalin kerjasama antar unsur-unsur suatu organisasi. Manfaat terbesar membangun jaringan bisnis yang luas adalah meningkatkan koneksi yang dimiliki oleh seorang pebisnis perempuan dalam memimpin dunia bisnis. Dengan mengenal satu sama lain, orang bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Kebanyakan orang memiliki kesalahpahaman bahwa hubungan bisnis adalah soal penjualan. Jaringan bisnis kami yang kuat membuat Anda selalu mengetahui topik bisnis terkini. Hal ini dapat dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi terhadap potensi atau ancaman bisnis di masa depan. *Networking* dalam bisnis memungkinkan seorang pebisnis mengembangkan bisnis dengan membangun hubungan dan koneksi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Karena proses ini melibatkan membangun hubungan interpersonal, hubungan komunitas, dan bisnis lainnya.

Kehadiran komunitas bisnis juga memungkinkan seorang pebisnis perempuan meskipun yang masih pemula untuk dapat memperoleh informasi terkini mengenai produk serupa di berbagai wilayah, meskipun jaringan bisnis yang terlibat berada di wilayah berbeda. Tidak hanya itu, dengan mengembangkan bakat seorang wanita dapat percaya diri, hingga dapat memaksimalkan *circle*, memperkuat hubungan serta memperluas volume jaringan. Dengan jaringan yang berkualitas, jumlah jaringan akan meningkat secara organik.

4. BAZNAS dan Pemberdayaan Ekonomi melalui Program Mikrofinansial

Keuangan mikro telah berkembang sangat pesat selama dua dekade terakhir. Sejak keberhasilan program Grameen Bank yang diperkenalkan di Bangladesh pada awal tahun 1980-an oleh Muhammad Yunus (peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2006), lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia menaruh perhatian besar pada keuangan mikro yang mengentaskan kemiskinan sekaligus menghasilkan keuntungan (Baskara, 2013). Program Keuangan Mikro yakni alat peningkatan kredit dan alokasi risiko yang dirancang untuk mempromosikan pinjaman mata uang lokal oleh bank komersial dan lembaga keuangan kepada lembaga keuangan mikro. *Microfinance* adalah pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah kredit mikro yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memiliki skala usaha menengah ke bawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan (Baskara, 2013). Di Asia dan Pasifik, banyak pengusaha kecil kesulitan mendapatkan pinjaman usaha mereka. Lembaga Keuangan Mikro/LKM juga menghadapi tantangan yang sama dalam mengakses pembiayaan komersial.

Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang dinilai cukup optimal adalah pemberian kredit mikro yang telah dimulai sejak 1980-an. Pemberdayaan perempuan melalui keuangan mikro telah dilakukan sejak lama dan merupakan tujuan utama lembaga keuangan mikro yang menyelenggarakan keuangan mikro. Pada awalnya, program kredit mikro ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan tanpa memilah gender, namun dalam perjalanannya program kredit mikro

menjadi identik dengan perempuan dikarenakan jumlah partisipan yang mengikuti program ini didominasi oleh perempuan. Pemberian kredit mikro merupakan cara yang efektif dalam menjangkau kelompok perempuan yang tidak mempunyai sumber daya modal untuk bisa berdaya dan juga mandiri. Berawal dari kemandirian secara ekonomi ini diharapkan dapat mengangkat derajat perempuan dari sisi lain seperti pengambilan keputusan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui keuangan mikro dapat sekaligus mengatasi kemiskinan dan kesetaraan gender (Rahayu, N. S., & Kusumaningrum, 2015) .

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan lembaga keuangan mikro adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang secara ekonomi memiliki keterbatasan/miskin, khususnya perempuan, untuk mengakses layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan. Pemberdayaan dalam hal ini berarti memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis. Diharapkan dengan peningkatan kompetensi dalam tugas yang diemban dapat meningkatkan pendapatan, mengembangkan disiplin menabung, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, serta memperkuat kemahiran di bidang lain seperti pengelolaan keuangan sehari-hari. Bentuk pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro masih terbatas pada peningkatan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dimensi pemberdayaan gagal menjangkau dimensi sosio-politik yang lebih luas, hal ini terlihat dari kurangnya program yang terkait dengan gender dan pendidikan politik. Sebab, lembaga keuangan mikro merupakan pintu gerbang pemberdayaan masyarakat dan kelompok sasarannya adalah mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya dan belum berpikir untuk melakukan perubahan besar (Aljihad, n.d.).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, masalah ekonomi tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, namun juga dibantu oleh lembaga-lembaga dan stakeholder sekitar, seperti BAZNAS. BAZNAS meluncurkan BAZNAS Microfinance Desa (BMD), sebuah lembaga keuangan mikro non-profit yang akan memberikan layanan keuangan mikro, terutama pinjaman dan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro (Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

Contohnya adalah BAZNAS Microfinance Desa/BMD yang dilakukan di Bojongrangkas yang didesain untuk memberikan jasa layanan keuangan kepada pelaku usaha mikro sebagai bagian strategi dalam penanggulangan kemiskinan. BMD hadir karena sulitnya akses modal bagi pelaku usaha mikro. Padahal seperti yang kita tahu, penggerak ekonomi Indonesia didominasi oleh para pelaku usaha mikro yakni sekitar

51,3 juta unit usaha atau 99,97% dari seluruh unit usaha yang ada. Pada tahun awal, BMD Bojongrangkas menargetkan dapat memperkuat pendanaan modal kepada 400 pelaku usah mikro di wilayah Bojongrangkas dan sekitarnya. Selain itu, BAZNAS juga menjalankan fungsi pendampingan melalui manajemen pengembangan usaha dan mendukung peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang diperlukan. Pemberdayaan perempuan melalui *microfinance* Islami, hendaknya dapat dengan serius mempertimbangkan faktor-faktor negatif yang menjadi efek pergerakan program feminisme ala Barat, yang cenderung berlebihan membuat persamaan dan menghilangkan sekat antar-gender. Pemberdayaan perempuan melalui *microfinance* Islami, harus bisa menjadi pondasi utama pemberdayaan keluarga, karena keluarga adalah bibit unggul bagi masa depan generasi dan umat.

Simpulan

Sesuai dengan kajian tentang strategi dakwah perempuan berbasis pemberdayaan ekonomi dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi harus menjadi prioritas penting yang harus dijadikan fokus dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini akan mendorong kemandirian ekonomi perempuan, sehingga penguatan lingkungan keluarga, masyarakat bangsa dan negara juga ikut berjalan beriringan. Hal ini dapat dilakukan dengan program Pendidikan dan Latihan, adanya akses kredit, pengembangan jaringa komunitas dan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Peneliti menyarankan agar dakwah perempuan tidak hanya terkonsentrasi pada masalah fiqih perempuan, rumah tangga, ibadah, dan aspek syari'at namun juga perlu menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi serta Pendidikan, agar dapat memudahkan perempuan mengelola dan mendidik generasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M. et all. (2009). *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*. Fakultas Sastra Universitas Padjajaran.
- Aminuddin Sanwar, Pengantar Ilmu Dakwah, (Semarang: Fakultas dakwah, 1986), 34.
- Ahmad, Manajemen Strategis (Makassar: Nass Media Pustaka, 2020), 1.
- Aljihad, A. A. W. (n.d.). *Pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga Keuangan Mikro*. 61–73.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *BAZNAS Microfinance Desa Diresmikan di Bogor*. BAZNAS. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Microfinance_Desa_Diresmikan_di_Bogor/27?back=https://baznas.go.id/news-all
- Baskara, I. G. K. (2013). *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*. 44233.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, *Memberdayakan Perempuan, Membangkitkan Ekonomi*. (2022). Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Menuju Presidensi G20, Wujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Akses Setara bagi Perempuan*. (2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3386/menuju-presidensi-g20-wujudkan-pembangunan-ekonomi-inklusif-dan-akses-setara-bagi-perempuan>
- Narwoko, J. D. & S. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasir & Lilianti. (2017). Persamaan Hak: Partisipasi Wanita dalam Pendidikan. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(1), 1554. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/1554>
- Nursaptini dkk. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2).
- Program Keuangan Mikro*. (n.d.). Asian Development Bank. Retrieved November 22, 2023, from https://www-adb-org.translate.google.com/what-we-do/microfinance-program?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Rahayu, N. S., & Kusumaningrum, R. S. D. (2015). Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta). *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(03), 162–180.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar.
- Teniwut, M. (2022). *Mengenal Budaya Patriarki dan Dampaknya pada Perempuan*. Media Indonesia.
- Wardani, E. H. (2009). *Belunggu-Belunggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morisson dalam The Bluest Eye*.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ar Ruzz Media.